

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (Todaro, 2000:137). Akumulasi modal ini dapat berupa investasi-investasi langsung yang berupa investasi stok modal secara fisik maupun investasi terhadap infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya adalah penghubung berbagai macam aktivitas ekonomi (Purwoto dan Kurniawan, 2009).

Salah satu faktor yang dapat menghambat perekonomian di Indonesia adalah kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi seperti pembangunan jalan, bandara, dan pasokan listrik hingga infrastruktur sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sebelum krisis 1998, yaitu pada tahun 1994-1998, nilai total pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki rata-rata sekitar 9,2 persen terhadap PDB. Namun, dalam lima tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2009-2013, rata-rata total pembangunan infrastruktur hanya mencapai 4,3 persen terhadap PDB (Saleh, 2014:1). Bahkan berdasarkan *Global Competitiveness Report 2013*, kualitas infrastruktur di Indonesia secara keseluruhan masih berada pada peringkat 96 pada tahun 2010 dan secara bertahap

dapat memperbaiki kualitasnya karena pada tahun 2011 menduduki peringkat 90 dan naik sebanyak 8 peringkat di tahun 2013 yang mencapai peringkat 61 (Tabel 1.1).

Tabel 1.1
Kualitas Infrastruktur Indonesia

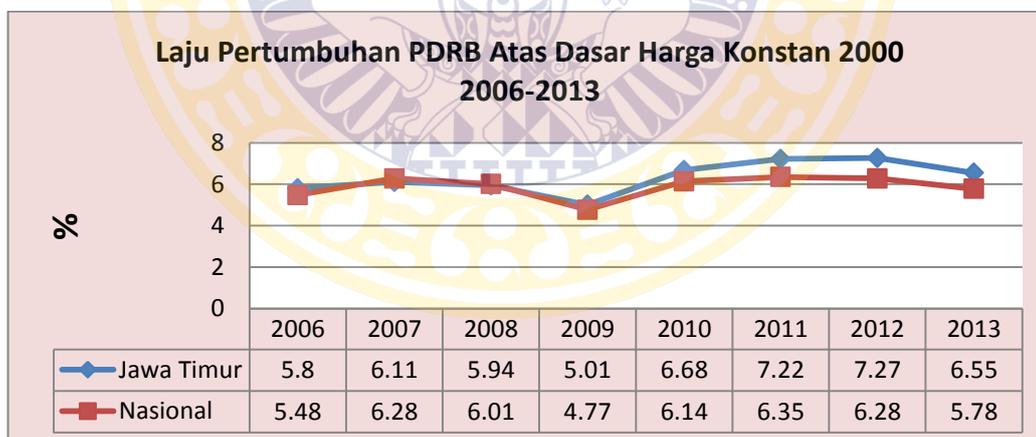
Indikator	Peringkat			
	2010	2011	2012	2013
Kualitas keseluruhan	96	90	82	61
Jalan	94	84	83	78
Kereta Api	60	56	52	44
Pelabuhan	95	96	103	89
Bandara	68	69	80	68
Pasokan Listrik	96	97	98	89

Sumber : *World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2013-2014*

Salah satu permasalahan infrastruktur di Indonesia menurut ISEI (2005) dalam Bappenas (2013) adalah kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Terdapat perbedaan yang mencolok mengenai ketersediaan pembangunan infrastruktur antara wilayah Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Lima provinsi dengan ketersediaan pembangunan infrastruktur terendah berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Untuk provinsi dengan ketersediaan pembangunan infrastruktur yang menempati urutan teratas adalah DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Utara,

Jawa Timur, dan Sulawesi Utara (Antara News, 2010). Kelima provinsi yang menduduki peringkat teratas tersebut dalam penyediaan infrastruktur memiliki permasalahan-permasalahan sendiri atas kondisi infrastrukturnya di masing-masing daerah tersebut khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tingkat pertumbuhannya yang mencapai lebih dari lima persen dari tahun 2006-2013. Bahkan rata-rata laju pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2007-2008 laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terlihat lebih rendah jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali mengungguli laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai lebih dari tujuh persen pada tahun 2011-2012 (Gambar 1.1).



Sumber : BPS Pusat dan Jawa Timur, 2006-2013

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)
2006-2013

Menyambut adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015, salah satu upaya pemerintah daerah Jawa Timur adalah dengan memperbaiki mutu infrastruktur di masing-masing kabupaten/kota. Adanya kualitas infrastruktur yang tinggi diharapkan dapat menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri dan dapat mendongkrak produktivitas pekerja di masing-masing kabupaten/kota. Langkah utama pemerintah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur di Jawa Timur adalah salah satunya dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Jalan merupakan salah satu dari komponen sistem transportasi dan disediakan sebagai basis alat angkutan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adanya jalan, sarana transportasi khususnya jalur darat tidak akan tersedia. Adanya pembangunan jalan merupakan keuntungan bagi masyarakat karena akan memudahkan akses untuk melakukan distribusi barang maupun jasa atau dapat melakukan kegiatan perekonomian lainnya.

Berdasarkan Bappenas (2013) panjang jalan provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 2.001 km dengan lebih dari 80 persen permukaannya beraspal. Namun, hanya sekitar 55 persen kondisi jalannya dalam keadaan baik di masing-masing kabupaten/kota. Rendahnya kualitas jalan tersebut dapat disebabkan karena kualitas konstruksi jalan yang tidak memadai, adanya beban muatan yang berlebih, serta bencana alam. Selain itu, proyek pembangunan jalan tol trans-Jawa dinilai sangat lambat (Mantingan-Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pandaan, Pandaan-Malang, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Banyuwangi, serta tol tengah kota

Surabaya). Hal ini menyebabkan tersendatnya distribusi barang dan jasa yang akan dijual ke pasar domestik atau yang akan diekspor (RPJMD Jawa Timur, 2009-2014).

Permasalahan infrastruktur lainnya yang terjadi di Jawa Timur yaitu ketersediaan infrastruktur listrik yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, tingkat elektrifikasi di Provinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 95 persen pada tahun 2012-2013 (EKPD dalam Bappenas, 2015). Berdasarkan data Susenas (2012) dalam RPJMD Jawa Timur 2009-2014 terdapat beberapa kabupaten yang rumah tangganya masih menggunakan penerangan non listrik, yaitu Kabupaten Sumenep, Jember, dan Pacitan.

Ketergantungan akan tenaga listrik ini kian hari kian meningkat mengingat keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas sehari-hari di masyarakat maupun sektor industri. Jika ditinjau dari segi ekonomi, infrastruktur listrik akan memacu pertumbuhan industri dan meningkatkan perdagangan (Usman, 2005). Energi listrik merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat baik pada sektor rumah tangga, industri, komunikasi, dan sebagainya.

Selain permasalahan infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik yang terjadi di Jawa Timur, masih rendahnya akses penduduk untuk mendapatkan air bersih juga mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Ketersediaan air bersih mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat dan juga berperan dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Pada tahun 2009-2013, penduduk yang memiliki akses air bersih hanya meningkat sebesar 3,42 persen (Majalah Potensi,

2015). Bahkan berdasarkan data Susenas (2012) dalam RPJMD Jawa Timur 2009-2014, lebih dari 10 persen penduduk masih mengonsumsi air yang tidak bersih di lima kabupaten diantaranya Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Sampang, Probolinggo, dan Sumenep.

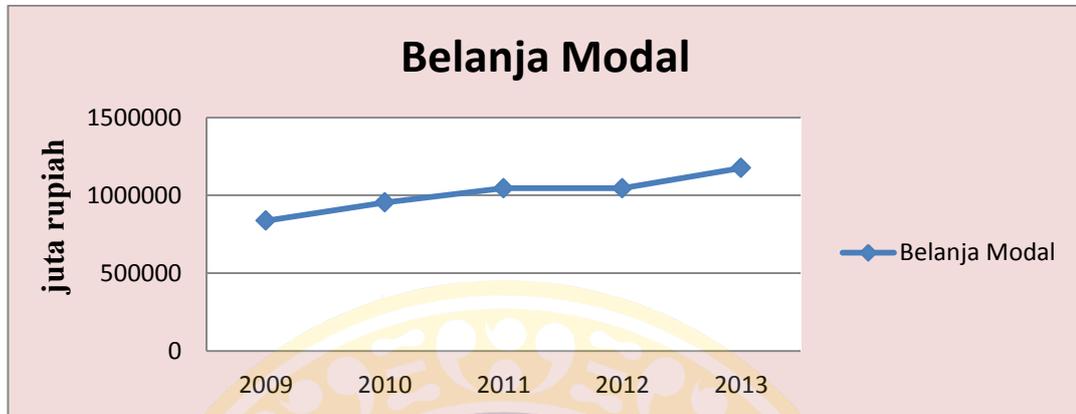
Salah satu target *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah terpenuhinya air bersih yang berkualitas terhadap semua penduduk. Pentingnya peranan air bersih sebagai keperluan rumah tangga, industri, dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pertumbuhan penduduk yang memicu perkembangan suatu daerah membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kehidupan masyarakat.

Berbagai permasalahan dengan kondisi infrastruktur yang terjadi di Jawa Timur akan dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Semakin rendah kualitas infrastruktur di suatu daerah, pembangunan di suatu daerah tersebut akan terhambat. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kualitas infrastruktur, maka pembangunan di suatu daerah akan berjalan cepat. Studi tentang pentingnya infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi pernah dilakukan oleh Sahoo *et. al* (2010) dengan hasil studinya yaitu terdapat hubungan jangka panjang antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di China. Prasetyo dan Firdaus (2009) juga meneliti tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan analisis data panel yang menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menyadari akan pentingnya peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, pemerintah perlu mengalokasikan sejumlah dana untuk pembiayaan infrastruktur di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan J.M. Keynes yang menyatakan bahwa pemerintah secara aktif ikut serta dalam mengelola perekonomian nasional (Sukirno, 2000:20). Salah satu belanja pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap (Kartika dan Dwirandra, 2014). Lebih lanjut lagi, Kartika dan Dwirandra (2014) menambahkan bahwa tujuan dalam membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana dan prasarana, serta infrastruktur adalah untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

Pada tahun 2013, porsi alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah sebesar 20,06 persen dari total belanja. Porsi alokasi belanja modal ini relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan porsi belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 persen pada tahun yang sama (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, 2013). Pemerintah perlu mengoreksi tentang anggaran belanja daerah terutama terkait dengan rendahnya anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur karena belanja modal merupakan salah satu belanja pemerintah yang sangat menunjang kegiatan ekonomi (Okoh dan Ebi, 2013). Secara umum, peningkatan belanja modal di Jawa Timur telah mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013 (Gambar 1.2, halaman 8), hal ini

dapat dijadikan pedoman bahwa pemerintah daerah tengah fokus pada upaya pembangunan infrastruktur.



Sumber : BPS, 2009-2014 (diolah)

Gambar 1.2
Perkembangan Belanja Modal di Jawa Timur
2009-2013

Selain modal, faktor lain yang tidak kalah penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah jumlah penduduk (Todaro, 2000:137). Adanya jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu wilayah dapat menjadi penggerak dalam perekonomian apabila tenaga kerja memiliki produktivitas dengan nilai tambah yang tinggi. Dengan ditunjang oleh kualitas tenaga kerja yang baik, produktivitas suatu output akan meningkat.

Adanya jumlah tenaga kerja terserap yang cukup banyak dan menurunnya angka pengangguran di Jawa timur menjadi nilai yang positif untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 (halaman 9) yang menunjukkan adanya perkembangan jumlah tenaga kerja pada tahun 2009-2013 di Jawa Timur meskipun sempat mengalami penurunan.



Sumber : BPS, 2009-2014 (diolah)

Gambar 1.5
Perkembangan Tenaga Kerja di Jawa Timur
2009-2013

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, beberapa diantaranya adalah infrastruktur, belanja modal, serta jumlah tenaga kerja. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, sangat penting bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga penelitian ini akan diangkat dengan judul “Pengaruh Infrastruktur, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air, belanja modal, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2009-2013?

2. Apakah infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air, belanja modal, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis secara simultan pengaruh infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air, belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2009-2013.
2. Menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air, belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2009-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah-masalah di bidang ekonomi pembangunan, khususnya ekonomi perencanaan tentang pengaruh infrastruktur, belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi setiap pembaca atau peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh infrastruktur, belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, yaitu pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan infrastruktur pembangunan.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Secara garis besar, kerangka pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diteliti. Merupakan kajian yang diperoleh dari

diktat-diktat selama masa perkuliahan maupun literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar pedoman penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, proses pengumpulan data dan pengolahan data, serta teknik analisis yang tersedia.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum dari obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan dari pembahasan dan saran yang dianggap perlu yang berkenaan dengan pembahasan skripsi.